

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.02, Oktober 2024, pp. 72– 82

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN KANTOR METEOROLOGI KALIMARAU KABUPATEN BERAU

SITI MUNAWAROH

[siti010890@gmail.com](mailto:siti010890@gmail.com)

INDAH MONICA

[indahmonica275@gmail.com](mailto:indahmonica275@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Berau

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan di Kabupaten Berau. Data primer dikumpulkan melalui wawancara pada informan yang terdiri dari Kepala Stasiun, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan metode kualitatif.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan sudah transparan dan akuntabel dalam pelaporan keuangannya. Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan merasa bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan merupakan komponen yang sangat penting, karena hal itu merupakan bentuk keterbukaan serta pertanggungjawaban kinerja dan pengelolaan keuangan oleh Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan. Adanya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan, masyarakat dapat ikut mengawasi kinerja OPD tersebut agar bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan dan tidak melakukan tindakan ilegal untuk kepentingan individu maupun kelompok yang dapat merugikan masyarakat dan negara.*

**Kata Kunci** *transparansi, akuntabilitas, laporan keuangan*

### ABSTRACT

*This study aims to determine the principles of transparency and accountability in the financial reports of the Kalimantan Meteorological Station Office in Berau Regency. Primary data were collected through interviews with informants consisting of the Head of Station, Treasurer of Receipts, and Treasurer of Expenditures at the Kalimantan Meteorological Station Office. To test the validity of the data in this study, the researcher used the source triangulation technique with a qualitative method.*

*The results of this study indicate that the Kalimantan Meteorological Station Office is transparent and accountable in its financial reporting. The Kalimantan*

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.02, Oktober 2024, pp. 72– 82

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

*Meteorological Station Office feels that transparency and accountability of financial reports are very important components, because it is a form of openness and accountability for the performance and financial management of the Kalimantan Meteorological Station Office. With the transparency and accountability of the Kalimantan Meteorological Station Office's financial reports, the public can participate in supervising the performance of the OPD so that it works in accordance with the mandate given and does not take illegal actions for the benefit of individuals or groups that can harm the community and the state.*

**Kata Kunci :** *transparency, accountability, financial reporting.*

## PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di sektor pemerintah, perusahaan milik negara/daerah dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik tersebut.

Entitas organisasi sektor publik sering kali merujuk pada organisasi pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Alasan lainnya adalah organisasi pemerintah merupakan organisasi yang memiliki lingkup yang paling luas diantara organisasi publik lainnya seperti perguruan tinggi, rumah sakit, organisasi politik dan lain sebagainya.

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan. Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah, perlu mendapat perhatian

yang serius. Dalam peraturan tersebut diatur tentang perlunya menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut, yang menjadi perhatian adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan mengelola keuangan dan mempertanggung jawabkannya. Adapun pilar tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan dan pelaksanaan keuangan pemerintah, perlu adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu unsur utama dari *good governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintah sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi daerah agar dapat berjalan dengan baik. Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik juga dapat diperlukan adanya unsur transparansi. Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.02, Oktober 2024, pp. 72– 82

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

maupun penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu, akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah ke arah yang lebih baik. Akuntansi pemerintahan juga menjelaskan adanya keharusan untuk menyusun laporan pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan kewenangan tersebut, maka secara hukum pemerintah wajib melaporkan kinerjanya kepada pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat. Adapun tuntunan tersebut sejalan dengan

*spirit good governance*. Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga sektor publik untuk lebih memperhatikan proses terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan. Masyarakat juga berhak mengawasi langsung bagaimana proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah. Tuntunan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan kini menjadi fokus penting bagi aparatur pemerintah, karena akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dan misi dari organisasi pemerintah untuk mewujudkan instansi yang maju,

kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis.

Tahap transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat (publik) agar mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan yang berasal dari pajak dan dana transfer. Pada tahap akuntabilitas, harus diungkapkan dalam informasi baik melalui laporan keuangan ataupun melalui media publik. Alat dasar dari transparansi adalah peraturan yang telah menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan alat pendukungnya adalah fasilitas *database*, sarana informasi dan komunikasi, serta petunjuk penyebar-

luasan informasi yang dimiliki penyelenggara pemerintahan, maupun prosedur pengaduan. Naiknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, akan menjamin naiknya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam melakukan pembangunan di daerahnya dan akan dapat mengurangi pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Penggunaan dana publik, rawan terhadap tindakan penyelewengan dana oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu pemerintah harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya. Dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*stakeholder*). Transparansi dan akuntabilitas, harus berdasarkan format yang telah

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.02, Oktober 2024, pp. 72– 82

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

ditetapkan sebelumnya seperti peraturan perundangan dan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan.

Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan di Kabupaten Berau adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan instansi pemerintah yang masih baru dan dalam tahap berkembang untuk menjadi organisasi yang lebih maju dengan menerapkan prinsip *good governance*. Oleh karena itu diperlukan analisis terhadap kinerja organisasi tersebut dalam hal pengelolaan keuangan yang tergambar pada laporan keuangannya, apakah sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Karena sebagai organisasi pemerintah yang masih dalam tahap berkembang tentunya memiliki banyak keterbatasan, terutama dari segi sumber daya yang dimilikinya.

Penulis melakukan pengamatan awal di Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan, dan baru mendapatkan sedikit informasi tentang laporan realisasi anggaran Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan. Penulis diizinkan untuk melihat laporan rencana anggaran dan juga melihat realisasi apa saja yang sudah tercapai. Namun, penulis belum bisa melihat laporan keuangannya secara keseluruhan karena pada saat itu belum akhir periode atau Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan belum tutup buku. Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang laporan tersebut untuk melihat apakah laporan tersebut sudah transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan organisasi pemerintah tersebut menjadi lebih baik terutama dalam menerapkan prinsip *good governance*.

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu:

1. Bagaimanakah transparansi laporan keuangan Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan di Kabupaten Berau?
2. Bagaimanakah akuntabilitas laporan keuangan Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan di Kabupaten Berau?

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prinsip transparansi pada laporan keuangan Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan di Kabupaten Berau.
2. Untuk mengetahui prinsip akuntabilitas pada laporan keuangan Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan di Kabupaten Berau.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.02, Oktober 2024, pp. 72– 82

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Penelitian ini mengambil unit analisis yaitu Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan yang

beralamat di Jalan Kalimantan Kelurahan Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara pada informan yang terdiri dari Kepala Stasiun, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan metode kualitatif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Transparansi Laporan Keuangan Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan

Laporan keuangan Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan berupa Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dilakukan secara berkala tiap semester dengan 2 cara, yaitu melalui aplikasi CaLK atau manual, tidak langsung dipublikasikan kepada masyarakat umum. Setelah Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan membuat laporan keuangan, dokumen CaLK tersebut kemudian dilaporkan pada Inspektorat BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) Pusat, serta ditembuskan kepada Koordinator BMKG Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb.

CaLK Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan akan dilakukan pengecekan dan diaudit terlebih dahulu oleh Inspektorat

BMKG Pusat. Setelah laporan keuangan tersebut diaudit dan sesuai standar yang berlaku bagi laporan keuangan tersebut, baru akan dipublikasikan ke masyarakat umum.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para informan yang menjadi narasumber, transparansi itu sangat penting karena dengan adanya transparansi laporan keuangan, publik menjadi tahu bagaimana kinerja dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan. Transparansi berperan penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat tentang kinerja Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan dan menghilangkan kesan seakan-akan menutupi kegiatan dalam pengelolaan dananya.

Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat umum berhak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang telah dipercayakan kepadanya agar sesuai dengan norma dan peraturan yang ada.

Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan tidak langsung melakukan

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.02, Oktober 2024, pp. 72– 82

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

transparansi laporan keuangan kepada masyarakat umum karena laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut nantinya akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk diperiksa oleh

BMKG Pusat dan kemudian diaudit oleh Inspektorat BMKG Pusat. Setelah diaudit BMKG Pusat baru akan melaksanakan transparansi laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan sudah transparan dalam pengelolaan keuangan maupun kegiatannya, karena pelaksanaan transparansi tersebut sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Salah satu tujuan dari transparansi adalah untuk menunjukkan keterbukaan mengenai pertanggungjawaban keuangan dan kinerja pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Kusuma (2015) transparansi sangat penting guna menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat bahwa pemerintah daerah merupakan instansi pelayanan publik yang profesional dan bebas dari tindakan kecurangan. Dengan adanya transparansi masyarakat dapat mengukur dan mengawasi kinerja serta pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah sehingga dapat mencegah kecurangan yang dapat terjadi.

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Andrianto (2017) yang menyatakan bahwa transparansi dapat mencegah korupsi serta meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah sehingga masyarakat lebih mampu untuk mengukur kinerja

pemerintah. Erlanda dan Khairudin (2016) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa transparansi adalah salah satu unsur guna menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas dari KKN.

## 2. Keuangan Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangannya pihak Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan membuat laporan keuangan seperti Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dibuat setiap awal bulan dan dilaporkan kepada KPPN Tanjung Redeb. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dibuat setiap awal bulan melalui aplikasi Sitamp dan Sakti dan dilaporkan ke Biro Perencanaan BMKG Pusat. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dibuat secara berkala setiap semester tahun berjalan dan dilaporkan kepada Inspektorat BMKG Pusat, serta ditembuskan kepada Koordinator BMKG Provinsi Kalimantan Timur dan KPPN Tanjung Redeb.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan nantinya diserahkan kepada Inspektorat BMKG Pusat guna dilakukan pengecekan, rekonsiliasi, dan audit sebelum nantinya dikonsolidasi oleh BMKG Pusat.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan tersebut didasarkan pada

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.02, Oktober 2024, pp. 72– 82

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

berbagai Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berkaitan dengan standar dan kebijakan akuntansi yang diberlakukan.

BMKG Pusat bertugas sebagai pihak yang melakukan monitoring proses pembuatan laporan

pertanggungjawaban keuangan Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan dengan didampingi oleh Inspektorat BMKG Pusat. Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala periode semesteran namun juga membuat laporan pertanggungjawaban bendahara setiap bulan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan kebijakan serta sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik. Peraturan tersebut yang mendasari instansi pemerintah diwajibkan untuk akuntabel dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangannya Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan didasarkan pada perundang-undangan dan peraturan pemerintah sesuai dengan yang disebutkan oleh nara sumber. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan akuntabilitasnya, Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan tidak menyimpang dari aturan dan norma yang ada. Setelah laporan

pertanggungjawaban keuangan selesai pun, pihak Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan diwajibkan untuk menyerahkannya ke Inspektorat BMKG Pusat guna dilakukan rekonsiliasi dan pengecekan lebih lanjut sebelum nantinya akan disatukan dengan laporan keuangan

dari Kantor Stasiun Meteorologi lainnya. Kemudian laporan keuangan Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan tersebut akan diserahkan kepada pihak yang mempunyai wewenang yang lebih tinggi.

Kewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas ini bertujuan agar masyarakat dapat mengawasi dan mengecek kinerja dan kegiatan operasional Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangannya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) berkaitan dengan akuntabilitas horisontal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Pelaksanaan akuntabilitas Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, ini menunjukkan bahwa Kantor Stasiun Meteorologi Kalimantan sudah akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan kebijakan, pengelolaan anggaran serta kegiatan operasional yang ada, hal ini sesuai dengan ciri-ciri yang sudah dikemukakan oleh Sopanah (2015).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Stasiun Meteorologi

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.02, Oktober 2024, pp. 72– 82

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

Kalimarau sudah transparan dan akuntabel dalam pelaporan keuangannya. Kantor Stasiun Meteorologi Kalimarau merasa bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan merupakan

komponen yang sangat penting, karena hal itu merupakan bentuk keterbukaan serta pertanggungjawaban kinerja dan pengelolaan keuangan oleh Kantor Stasiun Meteorologi Kalimarau. Adanya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Kantor Stasiun Meteorologi Kalimarau, masyarakat dapat ikut mengawasi kinerja instansi pemerintah tersebut agar bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan dan tidak melakukan tindakan ilegal untuk kepentingan individu maupun kelompok yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

## Saran

Penelitian ini terbatas pada instansi pemerintah yang memiliki jumlah pegawai yang masih sedikit sehingga program kerja dan pengelolaan anggaran yang diberikan padanya juga masih terbatas. Maka bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini pada aspek yang lain misalnya seperti independensi, responsibilitas, dan lain sebagainya, serta pada instansi pemerintah yang lebih besar dengan program kerja yang lebih banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2018. *Etika Bisnis dan Profesi*:

*Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Salemba Empat, Jakarta.

Ana, Angelina Trimurti Rambu dan Linda Lomi Ga. 2021. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi

Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9 (1): Maret 2021, Hal.62-72.

Andrianto, Nico. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing, Malang.

Arens, Alvin A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2015. *Audit dan Jasa Assurance*. terjemahan Herman Wibowo. Salemba Empat, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. 2020. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Arijanto, Agus. 2017. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Rajawali Pers, Jakarta.

Baining, M.E., Khairiyani, dan Wiwindari. 2023. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Simpang Nibung Rawas 2020). *JUPUMI: Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2 (1): 2023, Hal.65-79.

Darise, Nurlan. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks. Jakarta.

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.02, Oktober 2024, pp. 72– 82

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi. PT Semesta Rakyat Merdeka, Jakarta.
- Eivani, F., Kamran Nazari, and Mostafa Emami. 2015. Public Accountability and Government Financial Reporting. *African Journal of Business Management*, 6 (29): 25 July 2015, pp. 8475-8482.
- Erlanda, R. dan Khairudin. 2016. Pengaruh transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7 (2): hal.137-154.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2014. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. BPFE, Yogyakarta.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Teori Akuntansi*. Rajawali. Pers, Jakarta.
- Ikhsan, Arfan, dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis: untuk Akuntansi dan Manajemen*. Ciptapustaka Media, Bandung.
- Krina, P. Loina Lalolo. 2013. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabiitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Good Publik Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Kristianten. 2016. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kusuma, M. 2015. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris terhadap Persepsi Mahasiswa Diploma Akuntansi di Kediri). *Cahaya Aktiva*, 2 (2): hal.45-57.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Maulana, Zefri dan Nasrul Kahfi Lubis. 2020. Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4 (1): 2020, hal. 1-14.
- Minarti, Sri. 2015. *Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Ar-Ruzz Media. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munawaroh, S. 2022. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Pengendalian Biaya. *JES [Jurnal Ekonomi STIEP]*, Vol.7 No.1: Mei 2022, Hal.63-72.
- \_\_\_\_\_. 2020. Analisis Metode Pencatatan Persediaan Air

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.02, Oktober 2024, pp. 72– 82

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- Mineral Aqua pada UD Kaltim Makmur di Kabupaten Berau. *JES [Jurnal Ekonomi STIEP]*, Vol.5 No.2: November 2020, Hal.37-44.
- \_\_\_\_\_. 2020. Analisis Depresiasi Aktiva Tetap dan Dampaknya pada Laba PT Maja Prima Utama. *Musamus Accounting Journal*, Vol.3 No.1, Hal.1-8.
- \_\_\_\_\_. 2021. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban pada PT Jasa Raharja (Persero) Sub-Kantor Perwakilan di Kabupaten Berau. *Musamus Accounting Journal*, Vol.4 No.1: 2021, Hal.32-37.
- \_\_\_\_\_. 2019. Pengaruh Independensi dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Inspektorat Kabupaten Berau. *JEMMA: Journal of Economic, Management and Accounting*, Vol.2, Hal.27-35.
- \_\_\_\_\_. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. *JES [Jurnal Ekonomi STIEP]*, Vol.4 No.1: Mei 2019, Hal.46-56.
- \_\_\_\_\_. 2018. Efek Moderasi dari Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Kota Makassar. *Accountia: Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal*, Vol.2 No.1: April 2018, Hal.41-52.
- \_\_\_\_\_. 2017. Analisis Laporan Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bepede KS Cabang Berau di Tanjung Redeb. *ACCOUNTIA: Accounting, Trusted, Inspiring, Authentic Journal*, Vol.1 No.2: Oktober 2017, Hal.91-105.
- \_\_\_\_\_. 2017. Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laba CV Al- Gazali di Kabupaten Berau. *ACCOUNTIA: Accounting, Trusted, Inspiring, Authentic Journal*, Vol.1 No.1: April 2017, Hal.56-66.
- Munawaroh, S. dan Syafira Ramadhani. 2022. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Karyawan Tetap Berdasarkan *Gross up Method* pada PT Taubah Jaya Abadi di Tanjung Redeb. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, Vol.6 No.1, Hal.1-8.
- Munawaroh, S. dan Muhammad Taufiq. 2022. Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Full Costing pada Usaha Mikro (Studi Kasus UMKM Umbaring Berau). *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT)*, Vol.3 No.1: Juni 2022, Hal.129-144.
- Munawaroh, S. dan Faisal Akbar Fathoni. 2021. Analisis Penerapan *Activity Based Costing System* Dalam Menentukan Harga Pokok Penjualan *Food & Beverage* Hotel Bumi Segah Berau. *JES*

# Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.08, No.02, Oktober 2024, pp. 72– 82

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.umberau.ac.id/index.php/accountia>

- [*Jurnal Ekonomi STIEP*], Vol.6 No.2: November 2021, Hal.9-15.
- Munawaroh, S. dan Frendyka Junaedi Abdullah. 2020. Pengaruh Jumlah Pelanggan dan Jumlah Kwh Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Berau (Studi Kasus pada PT PLN (Persero) UP3 Berau untuk Kelompok Rumah Tangga). *Accountia Journal*, Vol.4 No.2: Oktober 2020, Hal.112-125.
- Munawaroh, S. dan Utami Paramita. 2019. Analisis Pencapaian Laba pada PT POS Indonesia (Persero) Tanjung Redeb. *ACCOUNTIA JOURNAL Accounting Trusted, Inspiring, Aunthetic Journal*, Vol.3, Hal.307-318.
- Mustopadidjaja, AR. 2013. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Penerbit LAN, Jakarta.
- Nurmin, Baiq. 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di Kampung Sukan Tengah Kabupaten Berau). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Berau.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2015. *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saputra, A., Intiyas Utami, dan Ika Kristianti. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah serta Potensi *Whistleblowing* atas Penyalahgunaan Dana. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13 (1): 2018, Hal.13-28.
- Sedarmayanti. 2018. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju, Bandung.
- Siregar, Syofian. 2016. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi. Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sitompul, Mhd. Syahman. 2016. Implementasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 dalam Pertanggungjawaban Mesjid di Sumatera Timur. *Jurnal Human Falah*, 3 (2), Desember 2016.
- Sopannah. 2015. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran Daerah dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Logos*, 3 (1): 2015.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Swasono, Sri Edi. 2017. *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Sumber Lain:  
Departemen Agama RI. 2016. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Penerbit Diponegoro, Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.